

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

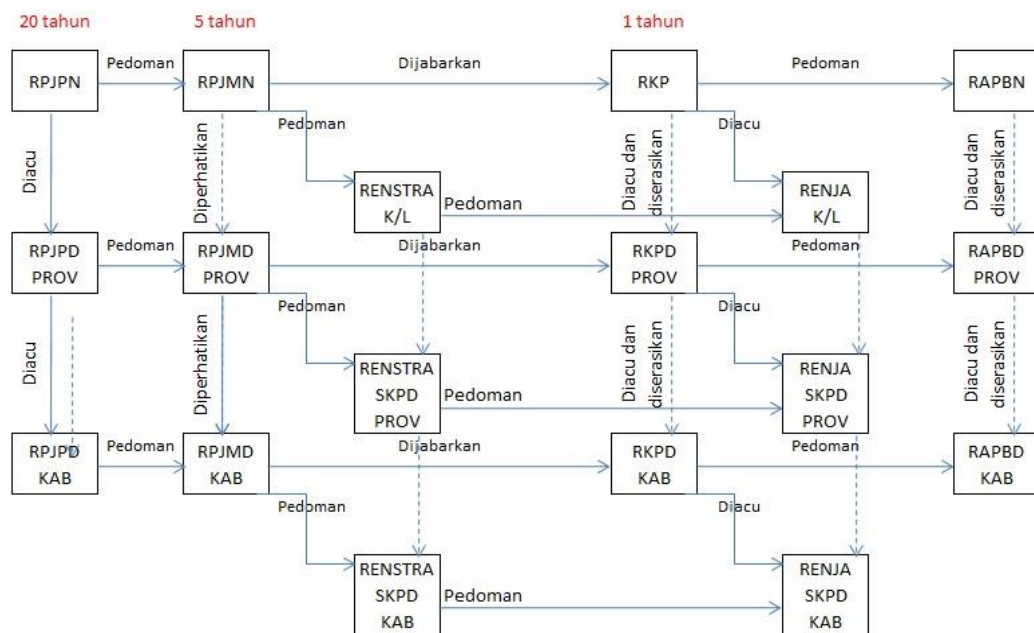
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak *Corona Virus Disease 19* baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dimasukan dalam Renja 2021 dengan formulasi program yang merupakan rangkuman guna pencapaian target.

Tahun 2021 Inspektorat mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di Kantor Sendiri dengan tetap menerapkan protocol kesehatan sesuai Standar Kesehatan New Normal. Demikian juga untuk kegiatan pengawasan di lapangan personil Inspektorat tetap menerapkan standar kesehatan new normal, dengan tetap menjaga jarak, membawa hand sanitizer, masker dan juga sering mencuci tangan.

Renja Inspektorat Tahun 2021 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Inspektorat Tahun 2021 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 4) Hasil Evaluasi pencapaian target program dan kegiatan RENSTRA Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 5) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 6) Pedoman dan standar-standar teknis Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 7) Rancangan Awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
- 8) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 9) Data Pokok Pembangunan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 10) Informasi lain terkait pelayanan Inspektorat.

b. Analisis gambaran pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis

indikator dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk kondisi tahun 2019-2023;

- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019, dan perkiraan realisasi tahun 2020 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2020;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Inspektorat Kabupaten Temanggung.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 berdasarkan RENSTRA Inspektorat Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat

sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung;

6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan

berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung ;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pembangunan Zona Integritas dan Peningkatan Kapabilitas APIP;

k. Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan

masuk dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2021;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- 2.6 Inovasi Perangkat Daerah
- 2.7 Penghargaan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

- 4.1 Catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019 terhadap capaian renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2020.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2020 terhadap target di Tahun 2021.**

Evaluasi terhadap capaian Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2019 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT & CAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2019

Indikator Sasaran RKPd yang akan dicapai dalam Renja PD :

1. Indeks kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2. Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2018		Target 2019			Realisasi 2019		Capaian 2019		Realisasi s/d 2019		Capaian s/d 2019		Ket.
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16
A	Pengawasan																		
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah				5.208.087.500				1.385.000.000	919.087.500	100	840.193.320	100	91,42	-	840.193.320		91,42	
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I	%	100				100			100		100		0		300		
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN I	%	100				100			100		100		100		100		

		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada wilayah IRBAN II	%	100			100		100		0		0		0		
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN II	%	100			100		100		100		100		100		
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN III	%	100			100		100		0		0		0		
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN III	%	100			100		100		100		100		100		
		Prosentase penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN IV	%	100			0		100		0		0		0		
		Persentase perangkat daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada wilayah IRBAN IV	%	100			100		100		100		100		100		
a.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala				2.192.918.000			50.000.000	397.918.000		385.282.515	141,25	96,82		385.282.515	27,02	17,57
		Terselenggaranya kegiatan program kerja pengawasan tahunan	LHP	720			140		238		170,00		238		33,06		

			Terlaksanakanya kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Temanggung	Obrik	1.416			264		297		112,50		297		20,97		
b.	Pengelolaan dan LHKPN	LP2P	Jumlah ASN yang melaporkan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi	lembar	56.000	65.160.000		4.000	25.000.000	10.160.000,00	3900	6.421.540	97,50	63,20	3900	6.421.540	7	9,86
c.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH					207.698.500			70.000.000	37.698.500,00	0	35.432.440	130	93,99	130	35.432.440	11	17,06
			Terselenggaranya kegiatan penyusunan RTP OPD, evaluasi pelaksanaan SPIP/RTP OPD, pembentukan satgas SPIP OPD, dan Kabupaten	OPD	191			20			20		100		20		10	
			Terlaksanakannya e-Mandiri Self Assesment pelaksanaan SPIP di OPD	OPD	151			10			16		160,00		16		11	

d.	Pelaksanaan LARWASDA/ Penyelesaian Tindak Lanjut	Terkoordinasinya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (8), dan Inspektorat Kabupaten Temanggung (550)	temuan	3120	201.015.000		568	50.000.000	36.015.000,00	433	32.958.800	76,23	91,51	433	32.958.800	433	16,40
e.	Pengolahan SIMWASDA	Tersedianya data hasil pemeriksaan yang akuntabel	bulan	60	116.030.000		12	25.000.000	22.030.000,00	12	18.158.550	100	82,43	12	18.158.550	20,00	16
f.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksanakannya kegiatan evaluasi LKJIP OPD	dokumen	235	300.740.000		47	100.000.000	51.740.000,00	47	51.291.500	100	99,13	47	51.291.500	20,00	17,06
g.	Review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan				275.950.000			170.000.000	45.950.000,00		45.762.200	108,33	99,59		45.762.200	12,92	16,58
		Tersusunnya Dokumen revidi LKPD (1), RKPD (1), RKPD perubahan (1), dan evaluasi LKJIP Bupati (1)	Dokumen	15			4			4	100		4		26,67		
		Terlaksanakannya kegiatan revidi RKA di OPD sampel	OPD	60			12			15	125		15		25		
h.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan				421.130.000			100.000.000	66.130.000,00		65.631.448	100,00	99,25		65.631.448	20,00	15,58

		Terselenggaranya kegiatan PKPT terhadap obyek pemeriksaan	dokumen	50			10			10		100		10		20	
		Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional, regional, larwasda, desk pkpt dan workshop PAPBJ	kegiatan	50			10			10	0	100		10		20,00	
i.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	dokumen	48	10.855.000		48	20.000.000	10.855.000,00	48	10.167.000	100,00	93,66	48	10.167.000	100	93,66
j.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli	Berkurangnya praktik pungutan liar pada semua lini layanan publik, tumbuhnya efek jera dari PNS dan pegawai dalam melaksanakan pungli	kegiatan	60	700.405.000		12	250.000.000	125.405.000,00	12	110.478.389	100,00	88,10	12	110.478.389	20,00	15,77
k.	Unit Pengendalian Gratifikasi	Turunnya angka laporan oleh PD yang melaporkan gratifikasi kepada KPK	laporan	178	91.186.000		48	25.000.000	15.186.000,00	2	9.723.250	4,17	64,03	2	9.723.250	1,12	10,66
l.	Survey Penilaian Integritas	Terselenggaranya survey penilaian integritas	PD	28	625.000.000		7		100.000.000,00	7	68.885.688	100,00	68,89	7	68.885.688	25	11,02

											Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Predikat	106,25						
2	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas	Persentase APIP yang memiliki sertifikasi profesi	%		781.241.000		2	265.000.000	181.781.000	100	178.783.485	100	98,35%	100	178.783.485	76,67	22,88	
a.	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas				551.306.000		29,16	200.000.000	151.846.000,00	3	149.124.740	100	98,21	3	149.124.740	60,00	27,05	
		Terlaksananya peningkatan SDM melalui Bintek/Pelatihan di kantor sendiri (PKS)	kali	10			2			2		100		2		20		
		Terlaksanakannya diklat profesi dan sertifikasi	orang	4			4			4	0	100		4		100		
b.	Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor				55.000.000			65.000.000	29.935.000,00	14	29.658.745	100,00	99,08	14	29.658.745	93,33	53,92	
		Terlaksananya pengelolaan JFA	orang	15			13			13		100,00		13		87		
		Terlaksanakannya bimtek dan workshop kapabilitas APIP, telaah sejawat dan bantuan diklat auditor	kegiatan	15			15			15		100		15		100		
											Rata-rata Capaian	100,00						

												Kinerja Kegiatan pada Program									
												Predikat									
3	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok dan pelaporan perangkat daerah	%	100	27.861.440			34	5.000.000	1.861.440	100	1.842.500	100,00	98,98	100	1.842.500	100	6,61	0		
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersedianya dokumen perencanaan pelaporan SKPD (Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, LKjIP, PKRENSTRA, Lap.Evaluasi Hasil Renja dan LPPD)	dokumen	27	27.861.440			34	5000000	1.861.440,00	34	1.842.500	100,00	98,98	34	1.842.500	125,93	6,61			
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program	100,00	98,98							
												Predikat									
4	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	952.893.500			100	159.000.000	155.386.000	100	141.574.775	100	80,80	100	141.574.775	20,00	14,86			
a.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan kantor	bulan	60	14.000.000			12	2.000.000	2.000.000,00	12	1.993.300	100,00	99,67	12	1.993.300	20,00	14,24			

b.	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	bulan	60	173.500.000			12	25.000.000	25.000.000,00	12	24.987.943	100,00	99,95	12	24.987.943	20,00	14,40
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	60	183.000.000			12	23.000.000	25.000.000,00	12	24.844.950	100,00	99,38	12	24.844.950	20,00	13,58
d.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60	9.000.000			12	1.000.000	1.000.000,00	12	902.000	100,00	90	12	902.000	20,00	10
e.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	60	14.400.000			12	3.000.000	2.400.000,00	12	2.184.000	100,00	91,00	12	2.184.000	20,00	15,17
f.	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman	bulan	60	199.998.500			12	40.000.000	34.996.000	12	22.614.550	100,00	64,62	12	22.614.550	20,00	11,31
g.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya koordiansi dan konsultasi	bulan	60	289.995.000			12	50.000.000	59.990.000,00	12	59.925.532	100,00	99,89	12	59.925.532	20,00	20,66
h.	Jasa Pelayanan Perkantoran	Terselenggaranya penyelesaian tugas diluar jam kerja	bulan	60	69.000.000			12	15.000.000	5.000.000	12	4.122.500	100,00	82,45	12	4.122.500	20,00	6

												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program	100,00					
												Predikat						
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur		100	435.992.400			100	83.000.000	94.925.000	100	93.503.514	100	99%	100	93.503.514	93,33	21,45
a.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor (pengadaan gordena, front office, meja kursi tamu, dan AC)	unit	5	96.000.000			3	21.000.000	21.000.000,00	4	20.850.000	133	99	4	20.850.000	80,00	21,72
b.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	bulan	12	319.992.400			12	60.000.000	71.925.000,00	12	70.688.514	100,00	98,28	12	70.688.514	100	22,09
c.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	bulan	12	20.000.000			12	2.000.000	2.000.000,00	12	1.965.000	100,00	98,25	12	1.965.000	100	9,83
												Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program	108,33					
												Predikat						
	JUMLAH INDIKASI BELANJA LANGSUNG				7.406.075.840				1.897.000.000	1.353.040.940		1.255.897.594				1.255.897.594		
												Rata-rata	102,92	92,82				

Dari Tabel 2.1. diatas diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2019 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung berupa :

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu ;
 - a. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH target tercapai 100 %;
 - b. Kegiatan Pengolahan SIMWASDA target tercapai 100%;
 - c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target sudah tercapai 100 % dengan hasil telah dievaluasi SAKIP di 48 OPD;
 - d. Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan target tercapai 100 %;
 - e. Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi target tercapai 100 %;
 - f. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli target tercapai 100 %;
 - g. Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi target tercapai 100%;
 - h. Kegiatan Survey Penilaian Integritas target tercapai 100%;
 - i. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas target tercapai 100%;
 - j. Kegiatan Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor target tercapai 100%;
 - k. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan target tercapai 100%;
 - l. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor tercapai 100%;
 - m. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor tercapai 100%;
 - n. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai 100%;

- o. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor tercapai 100%;
 - p. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang – undangan tercapai 100%;
 - q. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman tercapai 100%;
 - r. Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah tercapai 100%;
 - s. Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah tercapai 100%;
 - t. Kegiatan Jasa pelayanan perkantoran tercapai 100%;
 - u. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor tercapai 100%;
 - v. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor tercapai 100%;
 - w. Pengadaan perlengkapan gedung kantor target tercapai 100%,
 - x. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional tercapai 100%;
 - y. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan yaitu;
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala capaian kinerja sudah melebihi target yang ditentukan. Capaian kinerja Tahun 2019 yaitu 238 %. Dengan target 140 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditentukan tercapai 238 LHP, dikarenakan pada awal tahun pelaksanaan program kerja pengawasan ada tambahan tugas untuk evaluasi laporan keuangan Sekolah, SD dan SMP di Kabupaten Temanggung;
 - b. Kegiatan review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan target tercapai 100%;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu :
- a. Kegiatan Pengelolaan LP2P dan LHKPN target kinerja tercapai 97,50%

- b. Kegiatan Pelaksanaan LARWASDA/ Penyelesaian Tindak Lanjut baru tercapai 76,23%

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Akan Tercapai** yaitu dengan nilai **90.16%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan :

- a. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mencapai 100 %
- b. Indeks Persepsi Anti Korupsi, capaian NA. Sampai dengan akhir tahun 2019 belum ada angka yang dilaporkan. Kegiatan penilaian dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, hasilnya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.

2. Indikator Sasaran :

- a. Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irban I, II, III dan IV, mencapai 100 %;
- b. Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irban I,II,III dan IV, mencapai 100%; dan
- c. Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi. Mencapai 100 %.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2014-2019

No	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	KONDISI 2018	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2019 (%)	STATUS		
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK
A	INDIKATOR TUJUAN																
	Indeks kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,045	3,045	3,045	3,15	3,15	3,3	3,045					92,27		AT	
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,34	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	NA					NA		AT	
B	INDIKATOR PROGRAM																
1.	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I, II, III dan IV	Persen	100	100	100	100	100	100	100					100	TT		
	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN ,II, III dan IV		100	100	100	100	100	100	100					100	TT		
3	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	%	19	28	33	38	42	47	30					63,83		AT	
				RATA RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH										90,11			

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 2 terdiri dari:
 - a, Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I, II, III dan IV
 - 1) Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
 - a). Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
 - b). Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi;
 - c). Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
 - d). Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
 - e). Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa;
 - 2). Faktor penghambat Indikator tersebut adalah :
 - a). Kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
 - b). Temuan pemeriksan terkait kebijakan lama ditidaklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;
 - c). Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi;
 - d). SDM APIP kurang/terbatas.
 - 3). Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :
 - a). Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjt dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;
 - b). Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;

- c). Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan;
- b. Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN ,II, III dan IV
 - 1). Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
 - a). Tersedianya anggaran untuk bintek sakip dan kegiatan evaluasi Sakip;
 - b). Adanya Juklak, Juknis, SOP terkait evaluasi sakip;
 - 2). Faktor penghambat Indikator tersebut adalah:
 - a). Adanya Mutasi persoil pengampu perencanaan;
 - b). Komitmen pimpinan belum optimal terhadap SAKIP;
 - c). SDM APIP yang terbatas dengan waktu yang singkat harus menyelesaikan evaluasi di semua OPD, berpeluang untuk menghasilkan laporan yang kurang memadai.
 - 3). Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :
 - a). Perlu diadakan Bimtek SAKIP bagi OPD (Kepala dan PPTK)
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 3 terdiri dari :
 - a. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - 1) Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
 - a). Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP,
 - Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung
 - Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan pemkab Temanggung;
 - b). Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng;
 - 2) Faktor penghambat Indikator tersebut adalah :

- a). Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
 - b). Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
 - c). APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia.
- 3). Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :
- a). Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
 - b). Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 - c). Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (2x setahun)
- b. Indeks Persepsi Anti Korupsi, capaian NA. Sampai dengan akhir tahun 2019 belum ada angka yang dilaporkan. Kegiatan penilaian dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, hasilnya disampaikan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi;
- 1) Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
 - a). Pengadaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien;
 - b). Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi;
 - c). Penerapan teknologi informasi yang baik (e planning budgeting, laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway);
 - d). nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah dilakukan.
 - 2) Faktor penghambat Indikator tersebut adalah :

- a). Pengendalian risiko organisasi belum memadai;
- b). Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi;
- c). Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM).

3). Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah :

- a). Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi;
- b). Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan masyarakat semakin berkurang;
- c). Mendorong dikembangkannya berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan;
- d). Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkan WBK/WBBM.

c. Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi

1). Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- a). Tersedianya anggaran untuk berangkat diklat;
- b). Komitmen APIP untuk meningkatkan kompetensi sesuai Standar AAPI;
- c). Peran APIP yang bergeser mewajibkan auditor mempunyai kompetensi yang memadai.

2). Faktor Penghambat Indikator tersebut adalah :

- a). Keterbatasan SDM dibanding beban tugas yang semakin meningkat , sehingga waktu/ kesempatan untuk pengembangan pegawai menjadi berkurang;
- b). Tidak dipanggil manalaka sudah mendaftar diklat substantif (daftar Tunggu banyak);

- c). Tingkat kesulitan kelulusan tinggi dalam diklat profesi.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari 1 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Nomenklatur Indikator pada Data Pokok
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	n.a	2,28	2,28	3,045	3,045
2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	n.a	n.a	3,34	3,38	n.a
3.	Persentase Penanganan hasil temuan pemeriksaan pada IRBAN I, II, III dan IV	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Perangkat Daerah yang SAKIP-nya dievaluasi pada IRBAN ,II, III dan IV	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	0 %	5 %	15 %	20 %	30 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dari 5 indikator kinerja kegiatan terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :

a. Indeks kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Hal ini disebabkan oleh :

- Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
- Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia.

b. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);

Hal ini disebabkan antara lain :

- Pengendalian risiko organisasi belum memadai;
- Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi;
- Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM).

c. Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi

Hal ini disebabkan antara lain :

- Keterbatasan SDM dibanding beban tugas yang semakin meningkat, sehingga waktu/kesempatan untuk pengembangan pegawai menjadi berkurang;
- Tidak dipanggil manalaka sudah mendaftar diklat substantif (daftar Tunggu banyak);
- Tingkat kesulitan kelulusan tinggi dalam diklat profesi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung antara lain :
 - a. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (terkait dengan penanganan tindak lanjut hasil temuan BPK RI);
 - b. Masih lemahnya SPIP di SKPD dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
 - d. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;
 - e. Peningkatan Kapabilitas APIP; dan
 - f. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dengan Rancangan Awal Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung 2021

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Catatan : Hasil analisis kebutuhan berupa

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		-			
A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		buku	3,000,000
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		buku	4,000,000
B	Administrasi Keuangan					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	2,321,369,638
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		-			
A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		buku	3,000,000
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		buku	4,000,000
B	Administrasi Keuangan					
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	2,181,215,428
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1,605,016,572

3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Temanggung	Tersedianya fasilitas lembur	12	bulan	15,000,000
C	Administrasi Umum					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan	4,000,000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	3,000,000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	36,000,000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	45,000,000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	2,000,000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kab Temanggung	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12	bulan	3,000,000
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Temanggung	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bulan	125,000,000
8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	60,000,000
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3	paket	15,000,000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	60,000,000

3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Temanggung	Tersedianya fasilitas lembur	12	bulan	15,000,000
C	Administrasi Umum					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	bulan	4,000,000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	3,000,000
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	36,000,000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	45,000,000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	2,000,000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kab Temanggung	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	12	bulan	3,000,000
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Temanggung	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bulan	125,000,000
8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	59,999,000
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Temanggung	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3	paket	15,000,000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	bulan	60,000,000

11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	bulan	5,000,000
D	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab Temanggung	Terlaksananya Bimtek, Workshop, Seminar dan PKS di Inspektorat Kabupaten Temanggung	15	Kegiatan	150,000,000
II	PROGRAM PENYENGGARAAN PENGAWASAN					
A	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
1	Audit Kinerja dan Keuangan		Tersusunnya laporan hasil kegiatan Audit Kinerja	4	OPD	54,000,000
2	Review Kinerja dan Keuangan					45,000,000
3	Pemantauan Kinerja dan Keuangan					208,000,000
4	Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Terlaksanakannya Bimtek dan Penyusunan LKjIP SAKIP	48	PD	100,000,000
B	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu					
1	Audit Kinerja dan Keuangan					210,000,000
2	Pemantauan Kinerja dan Keuangan					347,000,000

11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	bulan	5,000,000
D	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab Temanggung	Terlaksananya Bimtek, Workshop, Seminar dan PKS di Inspektorat Kabupaten Temanggung	15	Kegiatan	150,000,000
II	PROGRAM PENYENGGARAAN PENGAWASAN					
A	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
1	Audit Kinerja dan Keuangan		Tersusunnya laporan hasil kegiatan Audit Kinerja	4	OPD	54,000,000
2	Review Kinerja dan Keuangan					45,000,000
3	Pemantauan Kinerja dan Keuangan					208,000,000
4	Evaluasi Kinerja dan Keuangan		Terlaksanakannya Bimtek dan Penyusunan LKjIP SAKIP	48	PD	100,000,000
B	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu					
1	Audit Kinerja dan Keuangan					210,000,000
2	Pemantauan Kinerja dan Keuangan					347,000,000

III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab Temanggung	Tersusunnya Perub Perencanaan Pengawasan dan SK Program Kerja Pengawasan Tahunan dan terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional, regional, larwasda, desk pkpt	20/10	buku/ kegiatan	75,000,000
B	Asistensi dan Pendampingan					
1	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Kab Temanggung	Tertanganinya aduan masyarakat	100	%	30,000,000
2	Assistensi dan Pendampingan	Kab Temanggung	Terlaksanakannya Bimtek 48 OPD dan pendampingan Penyusunan RTP Tahun 2021	48	OPD	60,000,000
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					

III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
A	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab Temanggung	Tersusunnya Perub Perencanaan Pengawasan dan SK Program Kerja Pengawasan Tahunan dan terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional, regional, larwasda, desk pkpt	20/10	buku/ kegiatan	75,000,000
B	Asistensi dan Pendampingan					
1	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Kab Temanggung	Tertanganinya aduan masyarakat	100	%	30,000,000
2	Assistensi dan Pendampingan	Kab Temanggung	Terlaksanakannya Bimtek 48 OPD dan pendampingan Penyusunan RTP Tahun 2021	48	OPD	60,000,000
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					

	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG					
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Tenwujudnya gedung inspektorat	1	unit	12,000,000,000
	JUMLAH DAU					15,980,369,638

	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG					
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Tenwujudnya gedung inspektorat	1	unit	12,000,000,000
	JUMLAH DAU					17,445,231,000

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKP Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKP Kabupaten Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak mengampu program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang lebih efektif, pada Tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Temanggung mulai melaksanakan program Klinik Konsultasi. Program ini dilaksanakan oleh Tim Konsultasi yang terdiri dari Auditor di Inspektorat kabupaten Temanggung, bertempat di ruang Klinik Konsultasi di Kantor Inspektorat Kabupaten Temanggung. Program ini untuk melayani konsultasi dari obyek pemeriksaan yang ada di Kabupaten Temanggung, terkait dengan permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan anggaran.

2.7 Penghargaan/Prestasi

Selama kurun waktu 3 tahun penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Inspektorat Kabupaten Temanggung ada 2 (dua) penghargaan atas prestasi kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penilaian Maturitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Temanggung

Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan nilai dari pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Indeks Kematangan SPIP disebut juga tingkat maturasi SPIP. Penilaian SPIP di lakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi.

Penilaian SPIP terdiri dari 5 indikator, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Hasil penilaian ada 5 level penilaian, yaitu:

- Level 1 : rintisan 1 < nilai < 2
- level 2 : berkembang 2 < nilai < 3
- level 3 : terdefinisi 3 < nilai < 4
- level 4 : terkelola & terukur 4 < nilai < 4,5
- level 5 : optimum nilai > 5

Tabel.2.7

Level Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung
Tahun 2015-2020

Variabel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Level SPIP	n.a	2,28	2,28	3,045	3,045	3,045

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Gambar 2.7

Piagam Penghargaan
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Temanggung



2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

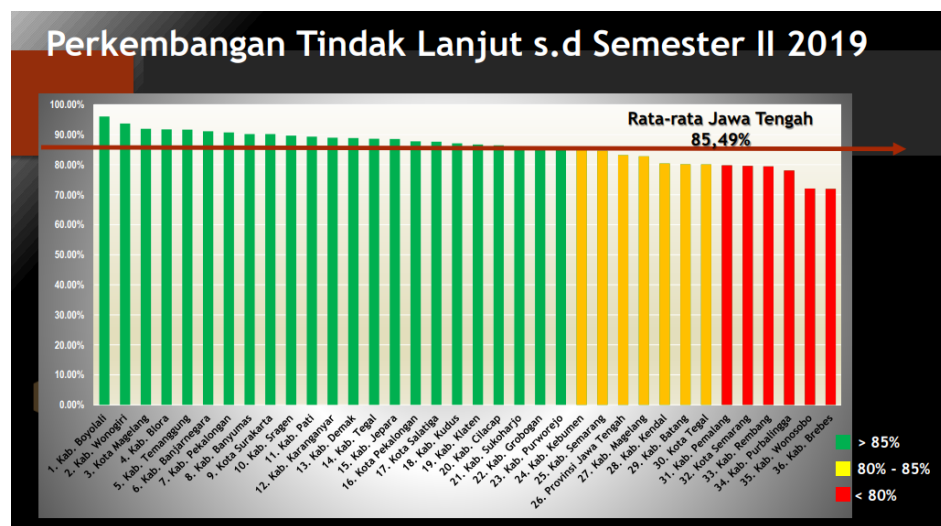
Penanganan hasil temuan pemeriksaan adalah kegiatan yang di laksanakan terhadap hasil temuan pemeriksaan, berupa pemantauan tindak lanjut. Pemantauan tindak

lanjut yaitu proses penilaian kemajuan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, maupun Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Dalam melaksanakan penanganan tindak lanjut hasil temuan BPK-RI periode semester II Tahun 2019, Inspektorat dalam peringkat ke 5 di Jawa Tengah.

Gambar 2.7.1

Perkembangan Tindak Lanjut BPK-RI s.d Semester II Tahun 2019 di Jawa Tengah



2. Peningkatan Kapabilitas APIP

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif yaitu:

- Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,
- Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,
- Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang memadai sesuai praktik terbaik yang berlaku secara internasional masih menjadi impian bangsa Indonesia. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level-3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Sementara itu, kondisi tingkat kapabilitas APIP saat ini sebagian besar (85,23%) masih berada pada Level-1. Pada level yang demikian ini terkandung risiko bahwa APIP tidak dapat secara optimal memberikan nilai tambah dari kontribusinya dibidang pengawasan intern bagi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu: Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Setiap Level terdiri dari 6 Elemen, yaitu: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk berada dalam level-level tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau (*Key Process Area*).

Setelah melalui upaya yang cukup panjang, Inspektorat Kabupaten Temanggung yang pada tahun 2016 masih berada di Level 1, pada tahun 2018 masuk ke Level 2, dan kemudian berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor SP-2485/D3/04/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Temanggung dan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Temanggung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor LQAPIP-1056/PW11/6/2019 tanggal 18 Desember 2019 kapabilitas Inspektorat Kabupaten Temanggung dinyatakan telah berada pada **Level 3** untuk semua elemen yang dipersyaratkan yaitu:

- a. Peran dan layanan
- b. Pengelolaan sumber daya manusia
- c. Praktik professional

- d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja
- e. Budaya dan hubungan organisasi
- f. Struktur tata kelola.

Guna menjaga capaian level kapabilitas dan meningkatkan efektivitas hasil pengawasan internal, sesuai arahan BPKP, inspektorat perlu kedepan:

- a. Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan praktik-praktik penyelenggaraan pengawasan yang baik secara terus menerus, sebagai persiapan menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
- c. Melakukan self assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Inspektorat lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung seperti, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Zona Integritas dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2021, maka tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Adapun sasaran dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini adalah dalam rangka:
 1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2021 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
 2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Inspektorat Kabupaten Temanggung Kab. Temanggung pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

VISI INSPEKTORAT KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target 2020	Kondisi Akhir 2023
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan			a. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.15	3.3
					b. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	3.5	3.8
			1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Penigkatan Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Prosentase penanganan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan pada Irbn I, II, III dan IV	%	100 %	100 %
			2. Meningkatkan cakupan OPD yang dievaluasi SAKIPnya		Prosentase SAKIP PD yang dievaluasi oleh Irbn I,II,III dan IV	%	100%	100 %

			3. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Sumber Daya Aparatur pengawas	Persentase APIP yang memiliki Sertifikasi Profesi	%	33%	38
--	--	--	---	---	---	---	-----	----

Kebijakan dan strategi Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2021 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2021 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2021.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Inspektorat Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021			(+/-)
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No.	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
I	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
	INSPEKTORAT DAERAH			INSPEKTORAT DAERAH		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
a.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3,000,000		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	3,000,000	-
2..	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4,000,000		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	4,000,000	-
b.	Administrasi Keuangan			Administrasi Keuangan		-
1..	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,181,215,428		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,181,215,428	-
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,605,016,572		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,605,016,572	-
3.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15,000,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15,000,000	-
c.	Administrasi Umum			Administrasi Umum		-
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	-
2.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3,000,000	-
3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36,000,000		Penyediaan Alat Tulis Kantor	36,000,000	-

4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,000,000	-
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,000,000	-
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	3,000,000	-
7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	125,000,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	125,000,000	-
8.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	59,999,000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	59,999,000	-
9.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	-
10.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60,000,000	-
11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5,000,000	-
d.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	150,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	150,000,000	-
2.	Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya		Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya		-
B	PROGRAM PENYENGGARAAN PENGAWASAN		PROGRAM PENYENGGARAAN PENGAWASAN		-
a.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		-
1.	Audit Kinerja dan Keuangan	54,000,000	Audit Kinerja dan Keuangan	54,000,000	-
2.	Review Kinerja dan Keuangan	45,000,000	Review Kinerja dan Keuangan	45,000,000	-
3.	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	208,000,000	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	208,000,000	-

4.	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	100,000,000		Evaluasi Kinerja dan Keuangan	100,000,000		-
b.	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu			Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu			-
1.	Audit Kinerja dan Keuangan	210,000,000		Audit Kinerja dan Keuangan	210,000,000		-
2.	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	347,000,000		Pemantauan Kinerja dan Keuangan	347,000,000		-
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			-
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			-
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	75,000,000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	75,000,000		-
b.	Asistensi dan Pendampingan			Asistensi dan Pendampingan			-
1.	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	30,000,000		Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	30,000,000		-
2.	Assistensi dan Pendampingan	60,000,000		Assistensi dan Pendampingan	60,000,000		-
D.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			-
a.	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			-
1.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota	15,420,000,000		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota	15.420.000.000		
							-

	JUMLAH TOTAL	20,865,231,000			JUMLAH TOTAL	20,865,231,000		20,865,231,000
	JUMLAH APBN	15,420,000,000			JUMLAH APBN	15,420,000,000		15,420,000,000
	JUMLAH DAU	5,445,231,000			JUMLAH DAU	5,445,231,000		5,445,231,000

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa tidak ada kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2019.

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

KODE REKENING	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2021				Alokasi Anggaran 2020	Kinerja Anggaran Tahun 2019			Prakiraan Maju Rencana 2022	Sumber Dana
			Lokasi	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6 01	INSPEKTORAT DAERAH											
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-										
6 01 01 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan : Renja, Perubahan Renja, Perjanjian Kinerja, RKA, DPA, RKPA, DPPA Perangkat Daerah	Kab Temanggung	7	dokumen	3,000,000	200,000	1,861,440.00	1,842,500	99	5,000,000	DAU
6 01 01 2.01 03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi : LPPD, LKJIP, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4), RFK (12)	Kab Temanggung	26	buku	4,000,000						DAU
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan											
6 01 01 2.02 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Temanggung	14	bulan	2,181,215,428	2,272,698,925	2,239,757,076.00	2,110,045,676.00	94	2,300,000,000	DAU
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Terpenuhinya Tambahan penghasilan ASN	Kab Temanggung			1,605,016,572	1,397,323,786	1,330,900,000.00	1,252,540,560.00	94	1,700,000,000	DAU
6 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya fasilitas lembur	Kab Temanggung	12	bulan	15,000,000	-	5,000,000	4,122,500	82	20,000,000	DAU

6	01	01	2.03		Administrasi Umum											
6	01	01	2.03	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Kab Temanggung	12	bulan	4,000,000	-	-	-		5,000,000	DAU
6	01	01	2.03	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kab Temanggung	12	bulan	3,000,000	3,000,000	2,000,000.00	1,993,300	100	5,000,000	DAU
6	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab Temanggung	12	bulan	36,000,000	37,500,000	25,000,000.00	24,987,943	100	40,000,000	DAU
6	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Temanggung	12	bulan	45,000,000	40,000,000	25,000,000.00	24,844,950	99	40,000,000	DAU
6	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Temanggung	12	bulan	2,000,000	495,000	1,000,000.00	902,000	90	3,000,000	DAU
6	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kab Temanggung	12	bulan	3,000,000	2,352,000	2,400,000.00	2,184,000	91	3,000,000	DAU
6	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Kab Temanggung	12	bulan	125,000,000	23,122,500	34,996,000	22,614,550	65	40,000,000	DAU
6	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab Temanggung	12	bulan	59,999,000	20,580,000	59,990,000.00	59,925,532	100	60,000,000	DAU
6	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab Temanggung				35,850,000	21,000,000.00	20,850,000	99	100,000,000	DAU
6	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Temanggung	3	paket	15,000,000	0	0	0	0	200,000,000	DAU
6	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Temanggung	12	bulan	60,000,000	69,998,000	71,925,000.00	70,688,514	98	75,000,000	DAU
6	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab Temanggung	12	bulan	5,000,000	3,000,000	2,000,000.00	1,965,000	98	7,500,000	DAU
6	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
6	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimtek, Workshop, Seminar dan PKS di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Kab Temanggung	15	Kegiatan	150,000,000	5,928,000	181,781,000	178,783,485	98	200,000,000	DAU
					Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya					8,000,000	-	-	-	-	9,000,000	DAU

6	01	02			PROGRAM PENYENGGARAAN PENGAWASAN											
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal											
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan hasil kegiatan Audit Kinerja	Kab Temanggung	4	OPD	54,000,000	420,320,000	397,918,000	385,282,515	97	70,000,000	DAU
6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya reviu RKA 16 opd, Reviu Dak 4, Reviu,RKPD, RKPD Perubahan, Reviu LKPD, Reviu LPPD, Reviu RPJMD,	Kab Temanggung	25	Dokumen	45,000,000	3,502,500	45,950,000.00	45,762,200	100	60,000,000	DAU
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya laporkan pajak-pajak pribadi (4000) dan kekayaan melalui aplikasi SIHARKA (500)	Kab Temanggung	4500	laporan	208,000,000	23,893,734	68,205,000	57,538,890	84	250,000,000	DAU
						Jumlah Obyek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi dan inspektorat Kabupaten Temanggung	Kab Temanggung	115	Obrik							
						Tersedianya data hasil pemeriksaan yang akurat dan akuntabel	Kab Temanggung	12	bulan							
6	01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Bimtek dan Penyusunan LKjIP SAKIP	Kab Temanggung	47	PD	100,000,000	59,182,000	51,740,000.00	51,291,500	99	125,000,000	DAU
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu											
6	01	02	2.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pengawasan pada Desa, SD dan audit PKK, Audit Investigasi, dan OPD	Kab Temanggung	96	LHP	210,000,000					230,000,000	DAU
6	01	02	2.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Prosentase terlaksananya survey penilaian integritas pada obyek yang ditentukan KPK dan pelaporan ke pusat	Kab Temanggung	100	%	347,000,000	29,589,734	251,446,000	199,254,327	79	400,000,000	DAU
						Terlaksananya pemenuhan elemen ZI	Kab Temanggung	5	PD							

						Terfasiasinya pengaduan gratifikasi	Kab Temanggung	100	%								
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											
6	01	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan											
	01	03	2.01	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Perub Perencanaan Pengawasan dan SK Program Kerja Pengawasan Tahunan dan terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional, regional, larwasda, desk pkpt	Kab Temanggung	20/10	buku/ kegiatan	75,000,000	1,991,500	66,130,000.00	65,631,448	99	125,000,000	DAU
6	01	03	2.02			Asistensi dan Pendampingan											
6	01	03	2.02	01		Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Tertanganinya aduan masyarakat	Kab Temanggung	100	%	30,000,000						DAU
6	01	03	2.02	02		Assistensi dan Pendampingan	Terlaksananya Bimtek SPIP OPD dan pendampingan Penyusunan RTP Tahun 2021	Kab Temanggung	48	OPD	60,000,000	0	37,698,500	35,432,440	94	75,000,000	DAU
6	01	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											
6	01	08	2.01			Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG											
6	01	08	2.01	02		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya gedung inspektorat	Kab Temanggung	1	unit	15,420,000,000	-					APBN

					JUMLAH TOTAL					20,865,231,000	4,458,527,679	4,923,698,016	4,618,483,830		6,147,500,000	
					JUMLAH APBN					15,420,000,000	-	-	-		-	
					JUMLAH DAU					5,445,231,000	4,458,527,679	4,923,698,016	4,618,483,830		6,147,500,000	

BAB IV

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Inspektorat Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 94,17% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 92,82% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 40,52% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 28,33 %.

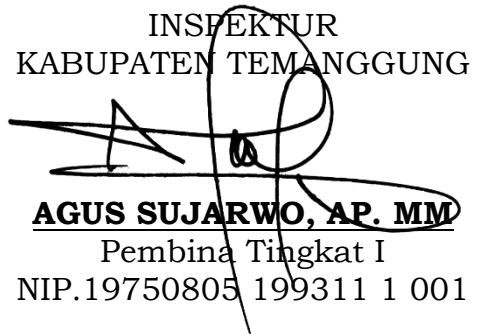
Dalam Renja Tahun Anggaran 2021 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.20,865,231,000,00 antara lain Program Penunjang Urusan Permerintahan daerah, Program

Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dan Program Penataan Bangunan Gedung.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2020

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SUJARWO, AP. MM

Pembina Tingkat I

NIP.19750805 199311 1 001